

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris. Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Al-Jawad, Ahmad 'Abd. 1986. *Ushul; 'Ilm Al-Mawaris*. Dar Al-Jil. Beirut.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryan. 2013. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana. Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Asas Hukum Islam*. Rajawali Press Tahun 1990. Jakarta.
- Andraini, Fitika. 2009. *Perbedaan Golongan Penduduk Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan*. Notarius. Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkanain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Pekembangannya di Indonesia*. Kreasi Total Media. Yogyakarta.
- Faturrahman, Addys Aldizar. 2004. *Hukum Waris*. Senayan Abadi Publisbing. Jakarta.
- Hamid, Syamsul Rijal. 2000. *Buku Pintar Agama Islam*. Penerbar Salam. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hasan, M. Ali. 1973. *Hukum Warisan dalam Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Hazairin. 1974. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadīts*. Tinta Mas. Jakarta.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia
- Ishaq. 1990. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kadir, Muhammad Abdul. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Kadir, Muhammad Abdul. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kalsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Bandung.
- Kansil, Christine S.T. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kartasaputra, Edy. 2012. *Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Penduduk Bumi Putra di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 1995. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nawawi, Imam. 1999. *Riyadhus Shalihin Jilid 2 (Terjemahan)*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat Di Indonesia – Suatu Penjelasan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Purwaka, I Gede. 1999. *Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata. Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum UI*. UI Press. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ramulyo, M. Idris. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*. CV.Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2005. *Fiqh Mawaris*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Pustaka Setia. Bandung.
- Santoso, Urip. 2011. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana*. Jakarta.
- Sari, Irma Devita Purnama. 2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung.
- Satrio, Juswito. 1992. *Hukum Waris*. Alumni. Bandung.
- Salman, H. R. Otje dan Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Refika Aditama. Bandung.
- Shabuni, Syeikh Muhammad Ali Ash. 1995. *Hukum waris menurut AlQuran dan hadist*. PT Trigenda Karya. Bandung.
- Shiddieqi, TM Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*, PT. Bulan Bintang. Jakarta.
- Sidik, Salim H. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soenardjo, R.H. Unang. 1984. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Risto. Bandung.
- Soesilo, R. 1989. *RIB/HIR dengan Penjelasan lengkap disertai Undang-undang/Peraturanperaturan: Hukum Acara Perdata-Hukum Acara Pidana Peradilan Umum*, PT. Karya Nusantara. Bandung.
- Subekti, R. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudaryanto, Agus. 2010. *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3*.
- Suherman, E. 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Mandar Maju. Bandung.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam pendekatan Teks dan konteks*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Syarifudin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Thalib, Sajuti. 1987. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Tjitrosoedibjo dan Subekti. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Tamakiran. 1987. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Pionir Jaya. Bandung.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 2002. *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Widjaja, H.A.W. 1992. *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*. Rajawali Press. Jakarta.
- Widjaja, H.A.W. 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Hukum Kostitusi*. Pustaka Setia. Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8 Mei 1991, Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 dan Ketentuan Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor Dpt/12/63/12/1969 Tanggal 20 Desember 1969 Tentang Ketentuan Surat Keterangan Waris  
Keputusan Walikota Bnadung Nomor 470/Kep.1385-Pem/2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pencatatan Surat Keterangan Waris di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Uraian Prosedur Penertiban berdasarkan Surat Edaran Walikota Bandung 593.311/1400-Bag.Huk.HAM Tanggal 28 Maret 2011 Perihal Surat Keterangan Waris

### Sumber Lainnya

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2010. *Pustaka As-salam*. Surabaya.

Hanum, Latifah. *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNIBumiputera*, Jurnal Nelti.

Hakim, Amrie. *Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d9ed1f603631/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris/>.

Naskur. *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)*. <https://media.neliti.com/media/publications/240180-asas-asas-hukum-kewarisan-dalam-islam-st-ca1ba806.pdf>.

Sudaryanto, Agus. *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*. *Mimbar Hukum* Volume 22. Nomor 3. Oktober 2010.